PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos (60236)
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkdjatim@gmail.com
S U R A B A Y A

Surabaya, 31 Oktober 2024

Nomor : 800.1.12.8/8300/204.3/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga)
Hal : Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Periode November Tahun 2025

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

Sehubungan dengan pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya **Periode November Tahun 2025**, maka disampaikan bahwa usulan tersebut dapat kami terima mulai tanggal **6 s/d 29 November 2024** melalui aplikasi E-Satyalancana di Si Master dengan masa kerja terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024.

Untuk kelancaran penyelesaian piagam dan petikan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya agar memperhatikan hal-hal berikut :

1) Berkas persyaratan dibuat dalam format PDF dengan susunan :
   a. Daftar Riwayat Hidup singkat (**Lampiran I**);
   b. Softcopy asli SK CPNS;
   c. Softcopy asli SK Pangkat Terakhir;
   d. Softcopy asli SK Jabatan Terakhir/Surat Tugas (bagi tenaga pendidik yang sudah pindah unit kerja namun belum ada SK Jabatan);
   e. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin (**Lampiran II**);
   f. Softcopy asli petikan/piagam Keppres SLKS yang sudah pernah didapatkan, jika petikan/piagam hilang dan tidak memiliki softcopy maka bisa dilampirkan surat kehilangan asli dari kepolisian setempat.

   Keseluruhan berkas tersebut dibuat dalam satu file PDF (maks 2000 kb) untuk setiap nama yang diusulkan dengan memperhatikan urutan seperti di atas.

2) Bagi PNS yang belum pernah mendapatkan Satyalancana Karya Satya dengan masa kerja lebih dari 20 tahun dan 30 tahun maka diusulkan dengan kategori X Tahun dengan ketentuan dalam softfile Daftar Riwayat Hidup wajib menuliskan belum pernah mendapatkan SLKS.

3) Format pengantar usulan melampirkan nama pegawai yang diusulkan dalam bentuk potrait, sesuai format (**Lampiran III**) dan dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur **c.q. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum ASN.**

4) Penulisan nama file masing-masing usulan PDF hanya mencantumkan nama lengkap saja (**contoh** : LILIK KIRANAWATI).

5) Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah wajib merekap hasil verifikasi SLKS pada tanggal 20 Januari 2025 dan disimpan dengan nama periode November 2025.

Diharapkan untuk membaca dan memahami lampiran dengan cermat. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



INDAH WAHYUNI , S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670409 199202 2 003

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran I : DRH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

1.	Nama Lengkap	
2.	Tempat, Tanggal Lahir	
3.	N I P	
4.	NIP Lama (jika ada)	
5.	Pendidikan Terakhir	
6.	Pangkat/Golongan Ruang Terakhir (TMT)	
7.	SK CPNS (No. dan Tanggal SK)	
8.	Jabatan Terakhir (No. dan Tanggal SK)	
9.	Jenis Kelamin	Pria/Wanita *)
10.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (Nomor dan tanggal Keppres)	Diisi "Belum pernah mendapatkan SLKS" (jika belum pernah mendapatkan Satyalancana Karya Satya)
11.	Hukuman disiplin (Jenis, Nomor, dan TMT dijatuhi hukuman s.d selesai)	Diisi "Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin" (jika belum pernah mendapatkan hukuman disiplin)
12.	CLTN (Nomor, dan TMT CLTN s.d selesai)	Diisi "Tidak pernah mengambil CLTN" (jika belum pernah mengambil CLTN)

Mengetahui,
Jabatan Atasan Langsung

(ttd+stempel) / tte

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Surabaya, November 2024
Hormat saya,

Ttd/tte

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Lampiran II : Contoh Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

NOMOR : / / /2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan : Kepala Perangkat Daerah / Sekretaris Daerah / Gubenur Jawa Timur
Unit Kerja : Provinsi Jawa

Timurdengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang:
Jabatan :
Unit Kerja :

sesuai data kepegawaiannya, Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik hukuman disiplin sedang maupun berat.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai kelengkapan persyaratan pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, November 2024
KEPALA PERANGKAT DAERAH/
SEKRETARIS DAERAH/ GUBERNUR
PROVINSI JAWA TIMUR

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Catatan :

1. Untuk Guru SMA/SMK ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.

Lampiran III

Contoh Format Usulan Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya

No. Urut	Nama NIP	Pangkat/Jabatan	Nomor dan Tanggal Keppres Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Sebelumnya	Tanda Kehormatan Yang Diusulkan
1.	Dr. Xxxx Xxxx 1962xxxx1989032002	Pembina Tk. I / Xxxx Xxxx	Satyalancana Karya Satya XX Tahun/TK/Tahun xxxx	Satyalancana KaryaSatya XXX Tahun
2.	Xxxx Xxxxx, S.T., M.M. 1965xxxx1999031001	Pembina / Xxxx Xxxxxx	Satyalancana Karya Satya XX Tahun/TK/Tahun xxxx	Satyalancana KaryaSatya XXX Tahun
3.	Xxxx Xxxxx, S.E., M.M. 1969xxxx1995032002	Pembina Tk. I / Kabid Xxxx	Satyalancana Karya Satya X Tahun/TK/Tahun xxxx	Satyalancana KaryaSatya XX Tahun
4.	Ir. Xxxx Xxxxx 1968xxxx1998031002	Penata / Xxxxx Xxxxx	Satyalancana Karya Satya X Tahun/TK/Tahun xxxx	Satyalancana KaryaSatya XX Tahun
5.	Xxxxxx Xxxx, S.AP. 1986xxxx2009061001	Penata Muda / Xxxxx Xxxx	-	Satyalancana KaryaSatya X Tahun
6.	X. Xxxx 1982xxxx2009101001	Pengatur / Xxxxx Xxxx	-	Satyalancana KaryaSatya X Tahun

Yang harus diperhatikan :

a) Usulan Tanda Kehormatan dikelompokkan berurutan berdasarkan SatyalancanaKarya Satya yang tertinggi, yaitu 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun.
b) Usulan disusun berurutan berdasarkan pangkat tertinggi.
c) Penulisan nama, pangkat dan jabatan menggunakan huruf besar dan kecil.
d) Penulisan gelar pendidikan menggunakan ejaan Bahasa Indonesia yang benar.
e) Lampiran usulan ditandatangani pejabat pimpinan instansi dan dibubuhi stempel instansi.